



## TAK SEBATAS SAMBUT PEMILU 2024

# Gandeng Ketua Kampung, Sosialisasikan Politik Santun

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogya berupaya menjadikan politik santun sebagai embrio terciptanya kondusivitas di masyarakat. Pihaknya pun menggandeng para ketua kampung untuk dapat turut serta mensosialisasikannya ke warganya masing-masing.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang-pol) Kota Yogya Budi Santoso, mengungkapkan sosialisasi politik santun menjadi agenda rutin yang sudah dilakukannya dalam setahun terakhir. "Saat ini segmen kita ialah tokoh masyarakat, dalam hal ini ketua kampung. Keberadaan mereka cukup strategis apalagi kelembagaannya juga sudah ada," terangnya di sela sosialisasi di kompleks Balaikota Yogya, Rabu (6/7).

Sosialisasi politik santun tersebut juga menjadi bagian dari proses pendidikan politik bagi

masyarakat. Ajang itu pun bukan sebatas untuk menyambut Pemilu 2024 melainkan supaya seluruh elemen masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu di dalamnya turut disampaikan beberapa norma dan nilai yang bisa diterapkan oleh masyarakat.

Budi menjelaskan, seluruh elemen menjadi sasaran sosialisasi politik santun. Termasuk para pengurus partai politik, organisasi sayap, penyelenggara pemilu hingga komunitas masyarakat. Dengan begitu masing-masing mampu

mengetahui hak dan kewajibannya, penyelenggara melakukan tugas dengan baik serta kondusivitas dapat berjalan. "Kami berharap para ketua kampung menjadi prototipe di masyarakat dalam menjalankan politik santun. Bahkan mampu menjadi mediator jika ada persoalan serta menjadi inspirasi," tandasnya.

Sementara Ketua Bawaslub Kota Yogya Tri Agus Inharto, menilai partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Terutama dengan sikap masyarakat yang netral serta mampu mengkondisikan agar suasana-

nya tetap kondusif. "Kami memiliki komitmen untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat. Ini butuh bantuan berupa partisipasi dari masyarakat sebagai pihak ketiga," katanya.

Salah satu potensi kerawanan yang kerap muncul di masyarakat, imbuhnya, ialah terkait alat peraga kampanye. Selain peserta pemilu yang saling berebut tempat dan titik lokasi pemasangan, ada beberapa kampung yang menolak alat peraga kampanye di wilayahnya. Apalagi suhu politik pada tahun 2024 mendatang bisa lebih kencang karena dalam satu tahun ada pemilu dan pilkada. Kendati pemilu digelar tahun 2024 namun setahun sebelumnya tahapan pemilu sudah berjalan. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005